

PERAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTUR (The Role of Massmedia in Multiculture Education)

Bambang RUDITO¹

Abstract. Many people in Indonesia always ask that one culture is a one ethnic group, whereas one ethnic group could consist of many cultures. This condition cause of that many people living in different area, such as in city, periphery, country side, inside the forest, swamp area, beach, and so on. This also we always ask that culture as same as civilization, those definition and meaning are very different, culture is point to abstract value, and civilization is point to behavior, there are pattern for living, such as hunting and gathering, slash and burned cultivation, irrigation cultivation, industrial and modern industry. This article try to explain that how the people in plural society could living together as a nation, and how the mass media could roles as a red yarn for uniting people in different culture, ethnic group and civilization.

Key words: Multiculture education, Massmedia, Sosialisasi

1. PENDAHULUAN

Pada zaman komunikasi sekarang ini media massa baik cetak maupun elektronik memegang peranan penting dalam penyebaran pengetahuan dari satu aspek ke aspek lain, dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu komunitas ke komunitas lain. Sehingga sebagai dampaknya akan terwujud suatu kesatuan global pengetahuan yang mau tidak mau akan dipahami diinterpretasi oleh kelompok-kelompok komunitas yang terkena syiar komunikasi yang bersangkutan.

Kita dapat mengerti adanya difusi (persebaran) yang kemudian dapat berlanjut ke bentuk akulturasi dan asimilasi pengetahuan dari satu sumber ke sumber lainnya. Dan ini dipegang perannya oleh adanya sistem komunikasi yang menjembatani dari sumber satu ke lainnya, dari penutur ke penerima, yang walaupun demikian perjalanan informasi tersebut tidaklah berjalan semudah teori yang ada, akan tetapi akan melalui beberapa pengaruh (noise) baik yang mendukung maupun yang menghambat selama informasi tersebut dalam perjalanannya.

Makalah ini akan berbicara bagaimana media massa, sebagai suatu

¹ Makalah ini pernah disampaikan pada seminar "pendidikan multikultural dan revitalisasi hukum adat" Asisten Deputi Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa (sejarah Kebudayaan) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Hotel Grafika Bogor, 18 - 20 Desember 2003.

sarana komunikasi memberikan peranannya dalam pembentukan atau pencetakan pengetahuan multikultur kepada seluruh elemen dalam sistem masyarakat secara nasional. Dimulai dari multikultur, konsep sosialisasi dan kesimpulan.

2. MULTIKULTUR

Kita sering mendengar apabila kita menyebut salah satu sukubangsa maka yang terbayang adalah kebudayaan dari sukubangsa tersebut, jadi seakan tampak bahwa dalam istilah suatu sukubangsa maka terdapat satu kebudayaan, seperti apabila kita menyebut orang Jawa, maka terbayang kebudayaan Jawa; orang Toraja, terbayang kebudayaan Toraja. Tetapi sedikit orang yang menyebut suatu golongan sosial tertentu tergambar satu kebudayaan tertentu seperti golongan elite dengan kebudayaan elitennya, atau golongan miskin dengan kebudayaan miskinnya. Walaupun demikian golongan-golongan sosial ini berasal dari individu-individu suku-sukubangsa tertentu, yang pada saat-saat tertentu dapat muncul dalam interaksi sosial yang terjadi.

Banyak orang, baik para ahli ilmu sosial, ekonomi, politik, birokrat dan bahkan orang awam sering menyebut bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan yang dimaksud biasanya mengacu pada banyaknya suku bangsa yang tinggal dan menetap di Indonesia, dan bahkan pengertian kebudayaanpun sering diungkapkan secara bersama dengan kesukubangsaan. Kemajemukan terkait dengan masyarakat yang artinya adalah masyarakat yang

jamak (*plural society*), sehingga akan menunjuk pada kesukubangsaan yang jamak atau banyak.

Pada perkembangan selanjutnya, dengan pola interaksi yang sangat intensif antar suku-suku bangsa yang ada dan juga antar masyarakat, maka terbentuk suatu model-model kebudayaan yang sangat bervariasi dan sering disebut sebagai multikultur. *Multicultural society* mengacu pada masyarakat dengan keanekaan budaya, yang berarti bukan saja memiliki kebudayaan yang jamak atau banyak tetapi juga bervariasi, berbagai macam, jenis. (lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994).

Variasi kesukubangsaan yang ada sebagai anggota masyarakat Indonesia tidaklah semata-mata variasi identitas saja, akan tetapi juga variasi kebudayaan (*culture*) serta peradaban (*civilization*) yang ada. Variasi identitas dapat ditengarai sebagai kesuku bangsa tertentu (seperti Gayo, Dani, Sunda, Dayak, Batak dsb.), kategori sosial tertentu (seperti pemuda, orang tua), golongan sosial tertentu (seperti golongan petani, buruh, intelektual, miskin dsb.). Ditilik dari model peradaban yang ada di Indonesia, berbagai peradaban hidup dan berkembang di sini, peradaban-peradaban ini diwujudkan kedalam bentuk komunitas (*community*) dan masyarakat (*society*). Komunitas disini yang dimaksudkan adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dimana seluruh anggotanya berinteraksi satu sama lain, mempunyai pembagian peran dan status yang jelas, mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaturan terhadap anggota-anggotanya (Koentjaraningrat: 1984; Warren, Cottrell dalam Ndraha: 1990); sedangkan masyarakat merupakan sekumpulan

orang yang mendiami wilayah tertentu dan anggotanya bisa berinteraksi antar masing-masingnya dan bisa juga tidak saling mengenal, masing-masing anggotanya menduduki status dan peranan tertentu yang sudah disediakan (Koentjaraningrat:1984).

Peradaban-peradaban tersebut terbagi dalam bentuk pedesaan yang melaksanakan mata pencaharian dengan menghasilkan bahan mentah atau barang dan perkotaan yang melaksanakan kegiatan mata pencaharian dengan cara jasa. Dari kedua bentuk tersebut akan terbagi lagi ke dalam beberapa kegiatan spesifik dalam pemenuhan kebutuhan akan makanan, seperti: (1) komunitas yang mempunyai mata pencaharian berburu dan meramu (2) komunitas yang berladang berpindah (3) komunitas nelayan (4) komunitas berladang menetap biasanya ditambah dengan adanya pemeliharaan ternak (5) masyarakat dengan sistem mata pencaharian bertani dengan irigasi, (6) masyarakat industri dan masyarakat pasca industri dimana dalam bentuk masyarakat ini segala kebutuhan pencaharian untuk hidup dipenuhi dengan jasa. (Koentjaraningrat: 1984; Van Ball: 1988).

Masing-masing peradaban ini diikuti oleh pola-pola bertindak yang sangat berbeda satu dengan lainnya, atau dalam arti mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda sebagai pola pengetahuan, nilai aturan dan norma yang dipakai untuk memahami lingkungan dan dipakai untuk mewujudkan tingkah laku (suparlan, 1982). Masing-masing peradaban ini bisa terwakili juga dalam satu suku bangsa atau dengan kata lain satu suku bangsa bisa terdapat beberapa peradaban, seperti misalnya anggota suku bangsa Mentawai, ada sebagian

anggotanya yang berperadaban berladang dengan bahan makanan pokok sagu yang hidup di dalam hutan sebagai wilayah kekuasaan baik sosial, politik, agama dan ekonomi, sebagian anggotanya ada juga yang hidup dalam peradaban industri dengan jasa sebagai mata pencahariannya tinggal di kota propinsi. Atau orang Dayak yang sebagian hidup di dalam hutan dengan mata pencaharian berladang pindah, dan sebagian lagi hidup di kota sebagai pegawai negeri atau anggota Parlemen. Atau orang Jawa yang sebagian anggotanya hidup di daerah pedesaan dengan mata pencaharian bertani sawah, atau tinggal di pesisir pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan, dan sebagian lagi hidup di kota besar maupun kecil sebagai pegawai atau buruh pabrik dengan pemenuhan kebutuhannya melalui jasa.

Begitu juga adanya variasi golongan-golongan sosial yang ada yang umumnya tercermin pada kehidupan perkotaan seperti golongan buruh, golongan pelajar, golongan elite dan sebagainya. Kesemua golongan ini mempunyai kebudayaan yang tersendiri yang berbeda satu dengan lainnya dan biasanya berada atau hidup dalam peradaban industri jasa. Anggota golongan ini bisa merupakan campuran dari berbagai anggota kesuku bangsa yang berbeda-beda, seperti golongan buruh bisa terdiri dari orang-orang suku bangsa Sunda, Jawa, Batak, Dayak dan sebagainya. Kedudukan dalam golongan-golongan sosial ini biasanya dicapai dengan cara-cara pendidikan, ekonomi maupun politik.

Dari sini tampak bahwa dengan melalui kebudayaannya manusia akan menggolong-golongkan lingkungannya dan bersamaan dengan itu dipakai juga

untuk mendorong terwujudnya tingkah laku dan tindakan berkenaan dengan strategi yang ada dalam menghadapi lingkungan, baik fisik maupun sosial.

Dalam interaksi sosial akan muncul di dalamnya identitas yang mencirikan golongan sosial dari individu yang bersangkutan. Salah satunya digambarkan sebagai sukubangsa. Identitas yang muncul tersebut akan berupa atribut-atribut yang bisa mengacu pada satu sukubangsa tertentu, atribut disini yang dimaksudkan adalah serangkaian ciri-ciri, tanda, gaya bicara, yang membedakannya dengan atribut dari golongan atau sukubangsa lainnya. Sehingga dari interaksi sosial yang terjadi antar sukubangsa akan tampak identitas dari sukubangsa yang berinteraksi tersebut (lihat Barth, 1969). Sukubangsa biasanya dicirikan dengan segolongan manusia yang mendiami wilayah tertentu yang luasnya bisa mencakup berbagai kondisi geografis dimana individu-individunya mempunyai kesamaan identitas dan biasanya dengan bahasa yang sama, kesamaan kesatuan sebagai golongan yang sama. Biasanya juga mempunyai latar belakang wilayah asal muasal masyarakatnya yang tercermin pada mitologi yang sama sehingga bersifat homogen. Perbedaan geografi walaupun menyebabkan perbedaan tindakan dan penggolongan-penggolongan tertentu dalam sukubangsa yang homogen, tetap akan menyamai ciri-ciri sukubangsa. Penggolongan ini terjadi dari proses adaptasi yang ada terhadap lingkungan masing-masing golongan yang bisa berbeda-beda. Tetapi berkaitan dengan sifat homogen ini, tidak berarti setiap golongan berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan serangkaian pelengkap yang membentuk sukubangsa tadi. Merupakan unsur-unsur yang

berkaitan satu sama lain yang diperlukan untuk membentuk satu kesatuan.

Sebagai satu masyarakat, seperti yang disebutkan di atas, Indonesia terdapat beberapa kebudayaan yang menjadi acuan dalam bertindak bagi anggota-anggotanya, yang dapat dijabarkan dalam kebudayaan nasional sebagai acuan, kebudayaan sukubangsa dan kebudayaan umum lokal (Suparlan, 1982). Dalam kehidupan masyarakat bangsa (*nation society*) terdapat dua oposisi vertikal yang tercermin dalam bentuk rakyat (*people*) dan pemerintah (*government*) (Rudito, 2003).

Dua oposisi vertikal ini juga mempunyai dua kekuatan yang berbeda, pemerintah menduduki status penguasa dalam masyarakat dengan kemampuan (*power*) mendominasi aturan sosial politik, ekonomi masyarakat dengan aturan tersebut, individu-individu anggota masyarakat dapat diatur, biasanya individu-individu yang diatur tingkah lakunya tersebut adalah individu anggota rakyat walaupun pada dasarnya aturan tersebut juga dikenakan pada individu anggota pemerintah. Dari segi jumlah, anggota pemerintah dapat dikatakan minoritas. Berbeda dengan rakyat yang menduduki status yang terikat pada aturan-aturan sosial politik yang dibuat oleh pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan, akan tetapi walaupun tidak mendominasi aturan, jumlah individu sebagai anggota rakyat ini adalah mayoritas dalam masyarakat. Anggota-anggota yang duduk dalam pemerintah berasal dari anggota rakyat, sehingga mereka juga berasal dari suku-sukubangsa tertentu, golongan-golongan sosial tertentu. Sebagai pemerintah, maka anggota rakyat yang sudah menjadi anggota pemerintah harus mewujudkan

tindakan dan tingkah laku berdasarkan aturan nasional (Rudito, 2003) pada arena-arena formal yang bersifat nasional.

Sebagai sebuah masyarakat negara, semua individunya tentunya mempunyai identitas yang sama yaitu anggota atau kewarganegaraan yang sama. Hal ini mendorong adanya satu kekuatan aturan untuk mendasari pemahaman dan interpretasi yang sama pula sebagai suatu kesatuan masyarakat negara. Biasanya aturan-aturan yang dipakai untuk berinteraksi dan berinterpretasi terhadap gejala sosial maupun lingkungan yang sama memakai simbol-simbol atau pola yang dibentuk oleh sekelompok individu sebagai penguasa negara. Akhirnya, individu-individu yang bertindak untuk mengatur pemerintahan mempunyai kemampuan pula untuk menerapkan dan memahami aturan negara yang bersangkutan sebagai alat bagi pemersatu dan dipakai menguasai aturan-aturan umum yang ada.

Penguasaan terhadap kepentingan umum ini menjadi ajang persaingan bagi para individu yang ada dalam komunitas pemerintah yang pada dasarnya individu-individu tersebut berasal dari kelompok-kelompok atau komunitas rakyat. Individu-individu yang bertindak sebagai pemerintah bisa berasal dari kelompok rakyat yang berbeda-beda, dan dengan melalui sarana politik tertentu, individu-individu tersebut dapat menduduki dan berperan sebagai salah satu anggota pemerintah sehingga dengan demikian terdapat suatu usaha untuk menguasai penentu dan pelaksana tujuan umum masyarakat (lihat Swartz; Bailey; Tuden 1969).

Untuk menjadi individu yang mempunyai kemampuan menguasai dan

dapat berperan di arena pemerintah, maka biasanya akan melalui tiga cara yang masing-masingnya bisa berjalan sendiri-sendiri atau bisa juga bersamaan. Cara tersebut umum dikategorisasikan sebagai cara pendidikan, kemampuan ekonomi dan politik. Cara pendidikan dilaksanakan sebagai kemampuan individu untuk memperoleh pendidikan formal dengan mencapai jenjang pendidikan tinggi yang mengikuti aturan pemerintah akan mampu menduduki strata atas dalam pengkategorisasian kehidupan sosial masyarakat dan individu ini dapat menjadi patron dalam masyarakat; kemampuan ekonomi merupakan suatu kemampuan yang dapat menggambarkan kehidupan yang baik dalam masyarakat, sehingga untuk individu dengan kemampuan ekonomi yang kuat, dia dapat dijadikan panutan bagi individu lain dalam masyarakat, sehingga individu dengan kemampuan ekonomi kuat dapat menjadi patron dalam kelompoknya; begitu juga individu yang bisa berperan dalam arena politik yang sedang berkuasa, atau dalam arti mengikuti atau terlibat langsung dalam sistem politik penguasa maka individu tersebut dapat menjadi patron dalam masyarakatnya.

Didalam kedudukannya di arena pemerintah, individu yang berasal dari rakyat akan melakukan penggolongan-penggolongan sesuai dengan pengetahuannya, penggolongan-penggolongan ini dapat menciptakan suatu anggapan, prasangka dan juga pertemanan yang dasar dari penggolongan ini adalah kebudayaan yang dipunyai. Atribut-atribut kesukubangsaan dapat menjadi dasar bagi usaha menggolongkan, sehingga akan memunculkan pendominasian salah satu kelompok. Kesamaan pemahaman

terhadap suatu gejala dan juga kemudahan dalam melakukan hubungan sosial dapat terjadi apabila jatidiri dari anggota-anggotanya mempunyai kesamaan, sehingga kecenderungan untuk membuat kelompok-kelompok yang sama jatidiri akan lebih besar, terutama dalam arena-arena formal untuk menjalankan tujuan dari kelompok tersebut. Selain itu kesamaan persepsi dipakai untuk mempertahankan kedudukan seseorang dalam arena formal atau sering disebut dengan pertemanan. Pertemanan ini bisa berkembang menjadi nepotisme dalam perkembangannya dalam kerangka yang lebih luas. Dominasi dari segolongan individu dalam sistem pemerintahan dapat menempatkan kebudayaan golongan yang bersangkutan masuk dalam sistem penggolongan nasional.

Dalam kenyataannya simbol-simbol yang terdapat dalam kebudayaan nasional dipakai oleh anggota masyarakatnya untuk berinteraksi satu sama lain yang bisa berbeda sukubangsa. Hal ini diperlukan untuk mencapai kesepakatan dalam pemahaman dari tindakan dan tingkah laku yang terwujud atau diwujudkan. Akan tetapi kadang-kadang, sebagai suatu masyarakat majemuk, anggota masyarakatnya dapat juga mengalami disintegrasi atau disinterpretasi manakala mereka menggunakan simbol-simbol budayanya sendiri-sendiri dalam memahami gejala yang sama.

Perubahan orientasi politik negara dari jaman Orde Baru ke jaman Reformasi yang berdampak munculnya otonomi daerah, dapat menciptakan suatu penguasa-penguasa baru dalam tingkat kedaerahan (propinsi). Melihat banyak dari masing-masing propinsi di Indonesia

terdapat pendominasian salah satu sukubangsa, maka hal ini dapat mengakibatkan munculnya kekuasaan dari kebudayaan sukubangsa tertentu dan berakibat pada timbulnya istilah 'putra daerah'. Istilah 'putra daerah' menjadi permasalahan tersendiri dalam pengkategorisasiannya, melihat bahwa penduduk di Indonesia pada kenyataannya sudah membaaur dalam tingkat migrasi dari satu daerah ke daerah lain dan bahkan banyak terdapat anggota sukubangsa tertentu yang terlahir di daerah 'perantauan' (daerah sukubangsa yang berbeda); dan membaaur pada tingkat asimilasi dalam artian perkawinan antar sukubangsa. Banyak daerah menterjemahkan 'putra daerah' adalah penduduk sukubangsa yang mendominasi aturan di daerah tersebut, atau penduduk sukubangsa yang mayoritas di daerah tersebut, dengan tidak memperhatikan apakah individu tersebut terlahir dan dibesarkan di daerah perantauan. Sehingga mengakibatkan penduduk pendatang 'dianggap' sebagai warga kelas dua, walaupun penduduk yang dianggap pendatang tersebut sudah bekerja atau bahkan terlahir di daerah itu.

Kebudayaan sukubangsa dapat saja berlandaskan pada aturan-aturan, nilai, norma keagamaan tertentu. Hal ini dapat terjadi karena agama sebagai teks suci dipahami dan diinterpretasi oleh kebudayaan sukubangsa tertentu sehingga menjadi keyakinan keagamaan. Nilai-nilai dan norma serta aturan agama yang diinterpretasi tersebut dijadikan pandangan hidup (*world view*) bagi penganutnya dan akan muncul setelah melalui penyaringan sistem etika dalam nilai budaya masyarakat. Hasil penginterpretasian ini akan diwujudkan dalam tingkah laku seperti halnya

kebudayaan yang muncul dalam bentuk atribut-atribut yang mengacu pada atribut segolongan orang. Sehingga keyakinan agama akan berfungsi sama dengan kesukubangsaan yang dijadikan jatidiri atau identitas yang askriptif sifatnya (Suparlan, 1999). Hal ini dapat terjadi karena bagi orang-orang di Indonesia, agama yang dianut lebih banyak merupakan warisan dari agama yang dianut oleh orang tuanya. Sehingga sering kita mendengar bahwa orang Melayu identik dengan Islam; orang Bali identik dengan Hindu; orang Aceh, Minangkabau identik dengan Islam bahkan bagi sukubangsa Minangkabau agama Islam dijadikan dasar bagi adat istiadatnya.

Keyakinan agama yang dijadikan sebagai pandangan hidup dan muncul dalam tindakan akan memunculkan penggolongan-penggolongan dalam tingkat sosial, artinya bahwa dalam berinteraksi akan terjadi penggolongan antara kelompok yang taat dan tidak taat, beriman dan kafir. Walaupun pengelompokan ini bisa terjadi dalam satu sukubangsa yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa keyakinan keagamaan yang dianut oleh individu-individu akan melewati batas kesukubangsaan. Untuk membedakannya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya maka biasanya dalam tindakan yang terwujud akan disertai dengan pembatasan-pembatasan tertentu, apa-apa saja yang boleh dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan, sehingga antara masing-masingnya tidak terjadi pencemaran karena melanggar pantangan yang diyakininya (lihat Douglas, 1966).

3. SOSIALISASI

Pada hakekatnya, manusia hidup akan mengalami sosialisasi dari semenjak lahir sampai manusia tersebut meninggal. Sosialisasi adalah suatu proses belajar berperan yang dikenakan pada manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam masyarakat akan diatur segala status dan peran dari individu-individunya sebagai anggota, antara status yang satu dengan lainnya akan mempunyai aturan-aturan dalam bertindak dan bertingkah laku yang perwujudannya dalam bentuk peran.

Status yang tersedia dalam masyarakat, pada dasarnya akan ditempati oleh individu-individu tertentu sehingga masing-masingnya dapat berinteraksi satu sama lain. Bagaimana seharusnya mewujudkan peranan berdasar pada status tertentu akan dipelajari oleh individu yang bersangkutan. Seperti bagaimana berperan sebagai seorang bujang, suami istri, anak dsb. Kesemuanya ini melalui suatu proses belajar berperan, dan apabila tidak sesuai maka si individu yang bersangkutan akan dikenai sanksi tertentu, atau dianggap sebagai individu yang *deviant*.

Untuk dapat belajar berperan tentang status yang tersedia di masyarakat, maka individu akan dapat memperolehnya melalui beberapa sarana sosialisasi. Sarana sosialisasi antara lain (1) orang tua dan kerabat, (2) teman bermain, (3) sekolah, (4) media massa, dan (5) masyarakat.

Pada waktu anak baru lahir dan menjelang usia-usia balita, maka peranan orang tua dan kerabat sangat penting dalam pemberian pengetahuan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan yang

tidak diperbolehkan dalam menghadapi kehidupan ini. pengetahuan-pengetahuan yang diberikan berkaitan dengan norma, nilai dan aturan yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan dimana dia menjadi anggotanya, khususnya aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga.

Beranjak besar, usia anak-anak yang membutuhkan teman sebayanya maka si anak akan belajar tentang peranannya dalam status diantara anak sebayanya. Pada waktu ini si anak mulai belajar menempatkan dirinya diantara teman sebayanya, belajar berorganisasi dengan permainan-permainan kelompok dsb.

Pada usia sekolah, si anak akan mendapat lagi norma, nilai, aturan dan pengetahuan yang berbeda sama sekali dengan norma, nilai, aturan dan pengetahuan yang ada dalam keluarganya. Pada usia sekolah si anak akan memperoleh pengetahuan, nilai dan norma serta aturan yang bersumber dari kebudayaan nasional. Sehingga si anak dapat menempatkan dirinya dalam status dia sebagai seorang warga negara. Pada usia sekolah juga si anak akan mendapatkan pengetahuan, nilai, aturan dan norma yang diperolehnya dari media massa. Hal ini dapat terjadi karena si anak dapat membaca, mencerna, dan mengemukakan ide-ide berkenaan kedudukannya dalam sebuah lingkungan sosial yang ada.

Kemudian, anak juga mendapatkan pengetahuan dari tingkah laku dan tindakan individu lainnya di dalam masyarakat. Masyarakat juga memberikan pengetahuan, nilai dan norma serta aturan yang harus dituruti oleh si anak dan apabila melanggar maka akan kena

sanksi tertentu dari masyarakatnya.

Kesemua pengaruh tersebut, seperti orang tua dan kerabat, teman bermain, sekolah, media massa dan masyarakat merupakan lingkungan dari seorang individu yang hidup dengan individu lainnya sebagai satu kesatuan sosial. Dari sini maka dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan menjadi sebuah faktor yang sangat menentukan bagi pertumbuhan individu dalam usahanya berperan dalam masyarakat sehingga dengan pengetahuannya dia dapat mewujudkan tindakan yang sesuai dengan kebudayaannya.

Sebagai salah satu sarana dalam sosialisasi, media massa sangat berperan dalam pembentukan pengetahuan tentang status dan peran yang tersedia dan ada dalam masyarakatnya. Media massa ini sangat penting perannya dalam mengkomunikasikan keadaan-keadaan dan bentuk-bentuk keanekaragaman individu dengan latar belakang kebudayaan yang sangat berbeda-beda di wilayah dimana media massa tersebut tersebar.

Peran media massa dalam bentuk masyarakat yang multikultur ini sangat penting guna menyebarkan model-model kehidupan dan masalah yang ada dalam masing-masing komunitas yang ada. Sehingga dengan demikian masing-masing komunitas dapat mengerti dan memahami model-model pengetahuan dan jati diri dari komunitas yang ada. Dengan adanya pengetahuan tentang golongan, kelompok sosial lain dari masing-masing komunitas, maka stereotip, prasangka dan diskriminasi antar komunitas dapat diperkecil perannya dan bahkan dapat diusahakan untuk tidak muncul dalam interaksi sosial yang ada.

Media sebagai sebuah perantara dalam memberikan pengetahuan tentang kelompok atau golongan sosial lain berikut dengan masalah-masalah yang ada, menjadi penting guna mengurangi dan memperkecil anggapan, prasangka negatif tentang kelompok dan golongan sosial lainnya dalam suatu masyarakat yang besar.

Untuk itu maka bagi pelaku yang bergerak dalam media massa sangat penting untuk mengetahui jatidiri dari masing-masing kelompok atau golongan sosial yang ada dan hidup di sekitarnya. Dan bahkan sangat berguna apabila pelaku media massa dapat mengerti tentang kebudayaan masing-masing kelompok atau golongan sosial yang ada di daerahnya.

Masalah sosial yang muncul dan ada di Indonesia pada dasarnya adalah banyak disebabkan karena perbedaan pengetahuan budaya yang dianut oleh masing-masing komuniti yang hidup di masyarakat. Ketidak sesuaian antara kenyataan dan pengetahuan yang ada menjadi sangat beragam manakala melibatkan banyak komuniti dengan kebudayaan yang berbeda, sehingga tidak jarang dapat memunculkan persaingan dan konflik sosial antar masing-masing komuniti. Persaingan dan konflik sosial dapat muncul apabila masing-masing kelompok dan golongan sosial kurang memahami kebiasaan kelompok dan golongan sosial lainnya. Disamping itu, masalah sosial yang ada juga disebabkan karena adanya dominan dan tidak dominannya kebudayaan suku bangsa yang ada pada masing-masing propinsi. Suku bangsa yang dominan di satu propinsi biasanya akan menggunakan kebudayaannya untuk mengatur interaksi sosial yang ada di propinsi yang

bersangkutan dan bahkan mengalahkan aturan nasional yang seharusnya ada dan dipakai sebagai sarana interaksi sosial. Hal ini dapat memunculkan nepotisme kelompok dan bahkan kesukubangsaan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka peranan media sangat penting bagi penyebaran pengetahuan baik kebudayaan nasional maupun kebudayaan pada masing-masing komuniti yang ada, sehingga dengan demikian masing-masing kelompok dan golongan sosial dapat memahami dan menghargai pendapat, perbedaan antar masing-masingnya. Keberpihakan media pada salah satu golongan atau kelompok sosial (biasanya pada golongan atau kelompok sosial dominan) akan dapat memperuncing persaingan dan konflik antar golongan sosial.

4. SIMPULAN

Kebudayaan merupakan cara pandang dari sekelompok atau segolongan orang terhadap lingkungannya dan mewujudkan tindakan yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan dari kelompok atau golongan sosial yang ada. Pengetahuan yang ada pada kebudayaan suatu golongan atau kelompok sosial ini akan diwariskan ke generasi berikutnya untuk mempertahankan cara dan adat istiadat yang sudah ada sebelumnya. Pewarisan ini melalui sarana sosialisasi.

Salah satu sarana sosialisasi yang ada secara konseptual adalah media massa, hal ini menjadi sangat penting pada era komunikasi yang ada pada saat sekarang ini. Pengetahuan tentang

kebudayaan kelompok dan golongan sosial lain dalam masyarakat yang multikultur ini sangat penting bagi kesatuan pandangan dan saling menghargai perbedaan yang ada, sehingga stereotip dan prasangka dari masing-masingnya tidak terwujud dalam tindakan yang bisa berupa konflik dan dominasi.

Oleh karena itu penting bagi pelaku yang bergerak di media massa untuk mengetahui kondisi sosial budaya masyarakat di Indonesia yang multikultur ini. Dan perwujudan pengetahuan ini tidak memihak pada salah satu kelompok saja.

Swartz, Marc J (ed) (1969) *Local-level Politics*, Chicago: Aldine Publishing Company.

PUSTAKA ACUAN

- Barth, F. (1969). *Ethnic Groups and Boundaries*, Boston: Little Brown.
- Bruner, Edward M. (1974). "The Expression of Ethnicity in Indonesia", *Urban Ethnicity* (Abner Cohen, Ed.) London: Tavistock
- Douglas, Mary (1966). *Purity and Danger, An Analysis of Concept of Pollution and Taboo*, USA: Penguin Books.
- Suparlan, Parsudi (2000). " Masyarakat Majemuk dan Perawatannya " *Jurnal Antropologi Indonesia*, nomor 63, hal 1-14
- Rudito, Bambang dan Adi, Prasetijo, Kusaeri (eds) (2003). *Akses Peran Serta Masyarakat*, Jakarta: Sinar Harapan dan Indonesia Center for Sustainable Development.
- Suparlan, Parsudi, (1982). "Masalah-masalah Sosial dan Ilmu Sosial Dasar", *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Depdikbud.